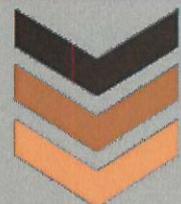


# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022



PENGADILAN NEGERI TUBEI KELAS II  
Jl. Raya Lebong-Argamakmur  
Telp/Fax (0738) 21041 Kode Pos 39163  
Email : [pn.tubei@gmail.com](mailto:pn.tubei@gmail.com)  
Website : [pn-tubei.go.id](http://pn-tubei.go.id)



PENGADILAN NEGERI TUBEI

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TUBEI

NOMOR : W8.U8/ 194.a/KP.04/1/2022

Tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI TUBEI

KETUA PENGADILAN NEGERI TUBEI

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Tubel perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor :120/KMA/SK/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 92/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tubei tanggal 28 Desember 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Tubei

MEMUTUSKAN

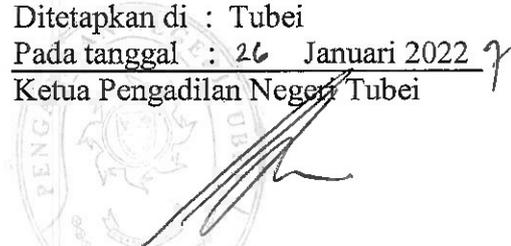
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TUBEI TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TUBEI

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Tubei, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Tubei agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tubei  
Pada tanggal : 26 Januari 2022  
Ketua Pengadilan Negeri Tubei

  
**IMAN BUDI PUTRA NOOR, SH., MH.**  
NIP.19770523 200112 1 002

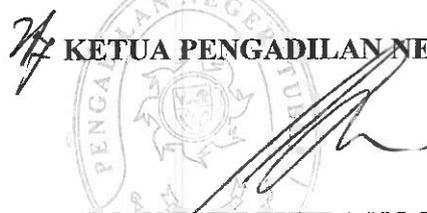
Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tubei

Nomor : W8.U8/ 191-a /KP.04/1/2022

Tanggal : 31 Januari 2022

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA DAN PENYUSUN  
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022  
PENGADILAN NEGERI TUBEI**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	FAKHRUDDIN, SH., MH	Wakil Ketua	Penasehat
2	MUCHAMMAD ARIEF , SH., MH	Panitera	Penanggung Jawab
3	HERI HERYANTO, SH	Sekretaris	Ketua Tim
4	THOMAS SILYAMET	Kepala Sub Bagian PTIP	Koordinator
5	HENDRI M , SH.	Panitera Muda Perdata	Anggota
6	ARIF BUDIMAN , SH.	Panitera Muda Hukum	Anggota
7	BONI MANIK, SH.	Panitera Muda Pidana	Anggota
8	ANGGUN PRIMA L. TOBING, SH.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Ortala	Anggota
9	PUTERI OCTARIA INDAH SARI, SH.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota

  
KETUA PENGADILAN NEGERI TUBEI

  
**IMAN BUDI PUTRA NOOR, SH., MH.**  
NIP 19770523200112 1 002



			<ul style="list-style-type: none"> <li>Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>		
4.	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu		<p><b>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu</b> _____ <b>100%</b>  <b>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b>  Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		<p><b>Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</b> _____ <b>100%</b>  <b>Jumlah Perkara Diputus</b></p> <p><b>Catatan :</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</li> </ul> </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		<p><b>Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi</b> _____ <b>100%</b>  <b>Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



11.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu 100% Jumlah Perkara Pidana yang Diputus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<b>Catatan :</b> • - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak		
12.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 100% Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu 100% Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus 100% Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100% Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

16.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) _____ 100%</p> <p>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
-----	--	---	---	----------	-------------------------------------